

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi transportasi atau alat angkut di Indonesia telah mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan jaman. Hal tersebut membuat jarak antar wilayah ataupun antar negara seolah – olah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobilisasi barang maupun orang semakin cepat. Salah satu transportasi yang banyak digunakan di Indonesia yaitu alat angkut di perairan atau kapal.⁽¹⁾

Menurut *International Health Regulation* (IHR) kapal adalah alat angkut yang mampu berlayar dengan atau tanpa mesin (layar) yang dapat melakukan perjalanan baik di dalam negeri maupun luar negeri ⁽²⁾. Sanitasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik dibidang kesehatan terutama kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta cara menysihatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik yaitu tanah, air dan udara.⁽³⁾ Pemeriksaan sanitasi dilaksanakan untuk menilai semua kondisi sanitasi terkait keberadaan faktor risiko lingkungan yang berada di kapal. Faktor risiko tersebut berupa bukti infeksi atau kontaminasi termasuk setiap stadium pertumbuhan vektor, binatang pembawa penyakit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, mikrobiologi, kimia, risiko lainnya pada kesehatan manusia dan setiap informasi setiap kasus pada manusia yang disampaikan oleh nahkoda kapal yang tercantum dalam *Maritim Declaration of Health* (MDH) ⁽⁴⁾ .

Pemeriksaan sanitasi kapal dilaksanakan untuk mendapatkan sertifikat sanitasi kapal yang diwajibkan pada setiap kapal yang beroperasi berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015. Sertifikat sanitasi kapal terdiri dari dua jenis yaitu SSCEC (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate*) adalah sertifikat sanitasi yang diberikan kepada kapal yang telah dilakukan pemeriksaan sanitasi yang dinyatakan bebas tindakan sanitasi. Sertifikat yang kedua yaitu SSCC (*Ship Sanitation Control Certificate*) merupakan sertifikat sanitasi kapal yang diberikan kepada kapal yang telah dilakukan tindakan sanitasi sesuai dengan rekomendasi dalam hasil pemeriksaan. Masing – masing sertifikat berlaku selama 6 (enam) bulan.⁽⁵⁾ Jika kapal tidak memenuhi syarat sanitasi maka terancam dikenakan sanksi denda ataupun penundaan operasi. Hal ini didasarkan Undang – undang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.⁽⁶⁾

Sanitasi kapal yang buruk akan berakibat pada permasalahan kapal seperti menumpuknya sampah dalam kapal akan mengakibatkan berkembangnya vektor dan Binatang pembawa penyakit seperti tikus, kecoa, nyamuk dan lalat. Diantaranya vektor tikus yang berisiko menyebabkan penularan penyakit seperti *Pes*, *Leptospirosis*, *Murine thypus*, *Rat bite Fever (RBF)*, *Salmonella enterica serovar typhimurium*, *Hantavirus pulmonary syndrome*.⁽⁷⁾ Hal ini tentunya berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan nahkoda dan anak buah kapal selama pelayaran karena mereka beraktifitas dan berinteraksi berada dikapal dalam waktu yang cukup lama tergantung rute perjalanannya.

Berdasarkan catatan *World Health Organization (WHO)*, lebih dari 100 *outbreak* penyakit menular berhubungan dengan kapal laut.⁽⁸⁾ Didukung oleh laporan *Center of Deasease Control and Prevention (CDC)* selama tahun 2024 terdapat 14 pelayaran yang mengalami wabah di Pelabuhan Amerika, sebanyak 301 penumpang dan awak kapal pesiar yang berlabuh di Pelabuhan Amerika mengalami diare dan muntah-muntah.⁽⁹⁾

Salah satu upaya untuk mengatasi faktor risiko lingkungan pada kapal dan memutus siklus penularan penyakit guna menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan adalah sanitasi kapal. Sanitasi kapal merupakan salah satu usaha yang ditujukan terhadap faktor risiko lingkungan di kapal untuk memutuskan rantai penularan penyakit guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Sanitasi kapal mencakup semua area evaluasi kompartemen kapal, seperti dapur, palka, gudang, ruang awak kapal, ruang penyimpanan makanan, pasokan air bersih, layanan makanan, pengolahan limbah, dan pengelolaan vektor penular penyakit atau hewan pengerat. Oleh karena itu, operator transportasi bertanggung jawab untuk menjaga agar alat transportasi bebas dari kontaminasi atau sumber penyakit, serta vektor penyakit.⁽¹⁰⁾

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 431 Tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan, pada alat angkut diperlukan upaya agar wilayah pelabuhan dan alat angkut tidak menjadi sumber penularan dan perkembangbiakan vektor penyakit. Pengendalian risiko lingkungan merupakan bentuk nyata usaha preventif penyebaran penyakit karantina dan potensial wabah dengan memutus mata rantai penularan penyakit melalui tindakan sanitasi kapal.⁽¹¹⁾

. Penelitian yang dilakukan oleh Yolli Indria Sari (2016) mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan anak buah kapal (ABK) dan peranan petugas kesehatan dengan kondisi sanitasi kapal di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang pada tahun 2016⁽¹²⁾. Serta dikemukakan juga oleh Dharma Setiawan (2019) terdapat hubungan antara kondisi sanitasi kapal dengan gaya kepemimpinan nahkoda, tingkat pengetahuan ABK, waktu sandar kapal, dana pemeliharaan, sarana dan prasarana dengan sanitasi kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tahun 2019.

Dalam ilmu manajemen, 5 M merujuk pada 5 elemen kunci yang penting dalam pengelolaan suatu organisasi. Kelima elemen tersebut adalah *Man* (Manusia), *Machine* (Mesin), *Material* (Bahan), *Money* (Uang), dan *Method* (Metode/Prosedur). Konsep ini sering digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis dan mengoptimalkan berbagai aspek manajemen. Konsep 5M ini membantu manajemen untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Dengan memahami dan mengelola kelima elemen ini secara optimal, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kinerja secara keseluruhan. Teori 5M (*Man, Method, Machine, Material, Money*) sangat penting dalam manajemen sanitasi kapal karena membantu mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sanitasi kapal. Dengan memahami dan mengontrol kelima elemen ini, manajemen dapat memastikan efektivitas dan efisiensi program sanitasi kapal, yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan dan keselamatan awak kapal serta mencegah penyebaran penyakit. Dengan mengelola kelima faktor ini dengan baik, manajemen kapal dapat memastikan bahwa program sanitasi berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan aman bagi semua orang di kapal.

Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibu Kota Tembilahan disebut “Negeri Seribu Parit” karena daerahnya terdiri dari perairan, sungai, rawa-rawa dan perkebunan kelapa, dipisahkan oleh ribuan parit. Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai luas wilayah 18.812,97 km² atau 1.881.297 Ha dan terdiri dari daerah daratan dan perairan. Posisinya Kabupaten Indragiri Hilir yang strategis secara geografis dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Pulau Batam dan Tanjung Balai Karimun, serta berada di wilayah perairan selat Malaka yang dengan mudah dapat mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri.⁽¹³⁾ Dengan padatnya lalu – lintas kapal

laut diperaikan tembilahan, maka meningkatkan potensi risiko penyebaran penyakit melalui kapal yang bersandar di pelabuhan pintu masuk negara/wilayah, selain berpotensi menjadi media pembawa vektor/ serangga penular penyakit juga dapat meningkatkan risiko pelabuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rawan terhadap gangguan vektor serta serangga penular penyakit.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan. UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara.⁽¹⁴⁾ Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas II Tembilahan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), menyelenggarakan fungsi Pengawasan dan Pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian Agus Adi hariyanto (2023) diketahui bahwa sanitasi kapal barang di Pelabuhan Tembilahan sudah terlaksana, namun belum optimal. Masih terdapat genangan air di kapal, perilaku ABK kurang memperhatikan kebersihan , ABK kurang mendapatkan informasi / pelatihan terkait sanitasi kapal dan masih terdapat kapal yang belum memiliki SOP sanitasi kapal⁽¹⁵⁾

Kapal kargo seringkali mengangkut muatan yang berpotensi membahayakan kesehatan baik itu bagi awak kapal maupun bagi lingkungan seperti bahan kimia, minyak bumi, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pestisida dan komoditi lainnya. Jika sanitasi kapal tidak baik maka hal ini tentu berpotensi dampak kesehatan dan dampak lingkungan yang besar serta kerugian secara ekonomi tentunya.

Pada tahun 2023 terdapat 1.275 kapal kargo yang datang dari luar negeri di seluruh wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas II Tembilahan. Hal ini berdasarkan laporan Tahunan BKK Kelas II Tembilahan Tahun 2023. Dengan padatnya lalu lintas kapal di pelabuhan Tembilahan, maka semakin meningkat pula faktor risiko kesehatan yang dibawa kapal tersebut dipelabuhan.

Jika dibandingkan dengan BKK Kelas I Dumai merujuk kepada Laporan Tahunan 2023 diketahui bahwa terdapat 1.015 penerbitan sertifikat sanitasi kapal kargo diseluruh wilayah kerja BKK Kelas I Dumai dengan jumlah sebesar 1.012 lembar (99,70 %) yang diperiksa kondisi sanitasi kapal kargo diantaranya dikategorikan risiko rendah dan hanya 3 kapal (0,3%) saja yang dikategorikan berisiko tinggi.⁽¹⁶⁾

Begitu juga dengan BKK Kelas I Pekanbaru terdapat sejumlah 1.467 pemeriksaan sanitasi kapal kargo yang diterbitkan dokumen sanitasi kapal pada tahun 2023, 1.466 (99,93 %) diantaranya dengan kategori risiko rendah dan hanya 1 (0,07 %) kapal saja yang termasuk kategori risiko tinggi dan telah dilakukan tindakan sanitasi kapal.⁽¹⁷⁾

Dari laporan Tahunan 2023 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan diketahui bahwa terdapat pemeriksaan sanitasi kapal dengan penerbitan sertifikat sanitasi kapal kargo berjumlah 910 lembar diseluruh wilayah kerja BKK Kelas II Tembilahan. Sebanyak 890 kapal atau 97,80 % diantaranya berisiko rendah dan 20 kapal atau 2.20 % diantaranya dikategorikan berisiko tinggi. (18) Sementara itu berdasarkan dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Sanitasi Kapal mewajibkan semua kapal memiliki Sertifikat Sanitasi Kapal dan Terbebas dari faktor risiko kesehatan. Sehingga jika dari hasil pemeriksaan sanitasi kapal terdapat faktor risiko kesehatan, maka harus dilakukan tindakan sanitasi kapal.⁽⁵⁾

Selain itu juga diperkuat dari hasil survey awal yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 di Pelabuhan Pelindo Tembilihan, dari 10 kapal kargo yang dilakukan pemeriksaan sanitasi kapal, terdapat 7 kapal kargo dengan tingkat risiko rendah dan 3 kapal kargo memiliki tingkat risiko tinggi. Masih ditemukannya kondisi dapur yang tidak memenuhi syarat yakni kondisi dapur yang masih kotor tidak memiliki tempat pembuangan sampah yang tertutup. Selain itu juga masih terdapatnya kabin tempat tidur anak buah kapal yang kotor dan tidak memenuhi syarat dan juga ditemukan tanda-tanda kehidupan vektor kecoa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Sanitasi Kapal Kargo di Wilayah Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas II Tembilihan Tahun 2025”. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian Agus Adi Hariyanto pada tahun 2023 , dengan melihat aspek 5 M (*Man, Money, Methode, Material, Mechine*) serta memperluas cakupan penelitian di 5 pelabuhan wilayah kerja BKK Kelas II Tembilihan.

1.2 Perumusan Masalah

Diketahui bahwa penerapan sanitasi kapal kargo, masih ditemukannya kapal kargo yang memiliki risiko tinggi, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan sanitasi kapal kargo di Wilayah Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas II Tembilihan Tahun 2025.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui bagaimana penerapan sanitasi kapal kargo di Wilayah Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilihan Tahun 2025

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui komponen *input* pada penerapan sanitasi kapal kargo di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan Tahun 2025 yang terdiri dari sumber daya manusia (*man*), Anggaran (*money*), metode atau kebijakan (*methode*) sarana dan prasarana (*material and machine*) .
2. Mengetahui komponen proses pada penerapan sanitasi kapal kargo di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan Tahun 2025 yang terdiri dari perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan dan evaluasi (*controlling*).
3. Mengetahui komponen *output* pada penerapan sanitasi kapal kargo di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan Tahun 2025 berupa penerapan sanitasi kapal kargo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan

Dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan penerapan sanitasi kapal kargo di Wilayah Kerja BKK Kelas II Tembilahan.

1.4.2 Bagi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat

Dapat menjadi referensi dan rujukan untuk melakukan pengembangan penelitian selanjutnya dan menambah referensi bahan bacaan bagi pembaca.

1.4.3 Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan menjadi bekal dan pengalaman nantinya memasuki dunia kerja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif untuk melihat bagaimana penerapan sanitasi kapal kargo di Wilayah Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan Tahun 2025. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2024 sampai dengan Juni Tahun 2025. Informan berjumlah 10 orang terdiri dari Nahkoda kapal, pegawai Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tembilahan, Anak Buah Kapal kargo dan petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan. Sumber data terdiri dari sumber data primer yang diperoleh dengan wawancara mendalam (*deep interview*) dan observasi. Sumber data sekunder berupa telaah dokumen yang diperoleh dari BKK Kelas II Tembilahan. Analisis data menggunakan cara triangulasi sumber dan triangulasi metode. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan sanitasi kapal kargo di Wilayah Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan.

